

Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya

Wisko Dwi Nurjiansyah

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

The purpose of this evaluation research to describe the result of assessment about accomplishment in realization of Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) program in Surabaya. Method of this research is qualitative with descriptive research type. The location of the research government institution which involve in the realization of Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh program, some of them is Badan Perencanaan Pembangunan Kota of Surabaya city, Dinas Sosial of Surabaya city as the institution that have responsibility for program organizer, DPRD of Surabaya city from legislative side. Purposive sampling technique is used to determine the informant of this research. Meanwhile, data collecting technique in this research is observation, depth interview with the informant and also written document. Then, triangulation technique is used to ensure validity of the data in this research. Furthermore, data analysis technique is using data reduction, data presentation and conclusion making. The result of this research shows that the realization process of Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh in Surabaya is not effective and efficient. This happens because the five factor of effectivity shows that the program is well runned only on the realization process, while the kind of program is not appropriate with the group objective needed so the result for this program is not effective. Then, from comparison between input and output shows that the result of the realization is not efficient with purpose accomplishment of the program.

Key Words: Evaluation, Program, Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)

Pendahuluan

Kepadatan penduduk tentu akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat maupun bagi pemerintah. Akibat dari kepadatan penduduk yang tidak dapat dikontrol tersebut, akan menimbulkan permasalahan ketika daerah tersebut memiliki keterbatasan dalam menyediakan sarana dan prasana bagi publik. Seperti dalam tabel berikut merupakan gambaran kepadatan penduduk dari beberapa provinsi di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi
Tahun 2013-2014

No.	Provinsi	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)		Pertumbuhan %
		2013	2014	
1.	DKI Jakarta	15.015	15.173	1,05%
2.	Jawa Barat	12.282	12.301	0,15%
3.	Banten	1.185	1.211	2,19%
4.	D.I.Yogyakarta	1.147	1.161	1,22%
5.	Jawa Tengah	1.014	1.022	0,78%
6.	Jawa Timur	803	808	0,62%
7.	Bali	702	710	1,13%
8.	NTB	254	257	1,18%
9.	Kep. Riau	227	234	3,08%
10.	Lampung	229	232	1,31%
	Indonesia	130	132	1,53%

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah

Dalam tabel 1.1 dapat dilihat 10 provinsi di Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Dari tabel tersebut terlihat bahwa urutan tertinggi terdapat di Pulau Jawa dan seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa menempati urutan teratas sebagai provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia.

Peningkatan jumlah penduduk yang terus terjadi semakin lama akan mengakibatkan beberapa dampak yang timbul dan menjadi pekerjaan rumah tangga bagi pemerintah daerah. Urbanisasi juga sering dianggap menimbulkan berbagai persoalan fisik dan non fisik. Sebagai konsekuensi dari migrasi internal yang meluas, maka banyak kota menghadapi masalah akibat urbanisasi yang cepat. Pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi, kekurangan perumahan dan berkembangnya permukiman kumuh yang ilegal (*squatter*) adalah beberapa contoh dari dampak yang tidak diinginkan karena perubahan distribusi penduduk, terutama akibat migrasi desa-kota. (Romdiati, at al, 2004:26)

Menurut Jonas Silas, permukiman kumuh/marginal memiliki kriteria pokok sebagai berikut: bila berada di lokasi yang ilegal; dengan keadaan fisiknya yang sub standar; penghasilan penghuni amat rendah (miskin), tak dapat dilayani berbagai fasilitas kota; dan tidak diingini kehadirannya oleh publik (kecuali yang berkepentingan). (Romdiati, at al, 2004:26) Permukiman kumuh ini biasanya tumbuh dan mudah dijumpai pada daerah - daerah berikut :

1. Daerah bantaran sungai
2. Dekat kel KA
3. Sekitar industri dan pergudangan
4. Sekitar pelabuhan, terminal, stasiun KA

Permasalahan daerah kumuh yang ada di perkotaan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan kemiskinan ini juga dirasakan oleh Pemerintah Surabaya, hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka kemiskinan yang ada di Kota Surabaya.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2010-2014 (dalam ribuan)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Penurunan (%)
2010	195.7	-
2011	183.3	-6,3%
2012	175.1	-4,5%
2013	169.4	-3,2%
2014	164.4	-2,9%

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Permasalahan daerah kumuh yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat miskin merupakan suatu fenomena yang kompleks dan saling terikat, karena hal tersebut telah lama menjadi permasalahan sosial di masyarakat. Oleh karena itu terdapat berbagai kebijakan maupun program yang telah dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini.

Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah baik dari pusat maupun daerah seperti Kampung Improvement Program (KIP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) maupun Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program yang ditujukan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, namun program – program tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik dan masih memiliki banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Terkait dengan hal itu pihak pemerintah Kota Surabaya memiliki program tersendiri yang dinamakan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), program ini merupakan bentuk pemberdayaan bagi masyarakat di Kota Surabaya yang utamanya masih tinggal di kawasan permukiman kumuh.

Program RSDK di Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya. Program RSDK ini dilakukan secara terpadu baik dalam hal perbaikan fisik lingkungan, sosial maupun ekonomi masyarakat perkampungan. Tujuan dari program ini sendiri terdapat dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015, sebagai berikut:

Tujuan program RSDK di Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

- meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan/atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh;
- meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;
- pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan

peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya;

- d. meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga.

Namun dalam perkembangannya program yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2003 ini masih belum dapat menuntaskan permasalahan baik itu kemiskinan maupun kawasan kumuh atau rumah yang tidak layak huni di Kota Surabaya. Perkembangan program RSDK ini dapat dilihat dalam data berikut ini:

Tabel 1.3
Jumlah Unit Rumah/KK Sasaran Program RSDK di Kota Surabaya Tahun 2014-2016

Tahun	Jumlah Unit	Peningkatan %
2013	400 Rumah/KK	-
2014	400 Rumah/KK	-
2015	622 Rumah/KK	55,5%
2016	622 Rumah/KK	-

Sumber: Diolah dari Dinas Sosial Kota Surabaya

Dalam tabel 1.3 terlihat bahwa Pemerintah Kota Surabaya ingin meningkatkan kinerja program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dengan melakukan peningkatan jumlah unit rumah atau keluarga yang menjadi sasaran penerima program RSDK. Namun permasalahan tersebut belum dapat terselesaikan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah keluarga berumah tak layak huni, seperti dalam data berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Keluarga Yang Memiliki Rumah Tak Layak Huni di Kota Surabaya Tahun 2010-2015

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Keluarga Berumah Tak Layak Huni	5.076	2.833	2.276	1.775	1.595	1.720
Peningkatan/Penurunan		-44%	-20%	-22%	-9%	+7,8%

Sumber: Data diolah dari Dinas Sosial Kota Surabaya

Pada tahun 2015 justru terdapat peningkatan jumlah keluarga berumah tak layak huni di Kota Surabaya, peningkatan tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.4 pada tahun 2015 terdapat peningkatan sejumlah 125 keluarga berumah tak layak huni, hal ini menjadi sebuah gambaran bahwa dengan adanya program RSDK, bahkan dengan adanya peningkatan jumlah sasaran program belum dapat menanggulangi permasalahan keluarga yang masih menempati rumah tak layak huni di Kota Surabaya.

Berdasarkan permasalahan dari fenomena dan data tersebut menjadi alasan mengapa perlunya dilakukan evaluasi pada pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya untuk melakukan penilaian terhadap kinerja program RSDK.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian evaluasi ini adalah:

1. Bagaimana evaluasi efektivitas pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya?
2. Bagaimana evaluasi efisiensi pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan hasil penilaian tentang efektivitas dari pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya.
2. Mendeskripsikan hasil penilaian tentang efisiensi dari pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini meliputi :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan perbandingan dalam rangka penelitian serta pengembangan lebih lanjut tentang riset evaluasi pada suatu program dalam hal ini lebih berfokus pada Evaluasi program pengentasan kemiskinan atau program bantuan kepada masyarakat miskin perkotaan, utamanya dalam permasalahan daerah kumuh di perkotaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi khususnya mengenai evaluasi program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) serta memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan program ke depannya. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait, dalam hal ini pemerintah khususnya Dinas Sosial selaku SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Bisa juga menjadi rujukan bagi pihak swasta yang ingin bekerjasama dan berkontribusi membantu dalam pelaksanaan program RSDK. Selain itu dapat menjadi bahan rujukan jika selanjutnya program ini masih berlanjut atau akan melaksanakan program yang sejenis dengan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), supaya dalam perencanaan dan pelaksanaannya nanti akan lebih baik lagi.

Kerangka Teoritik

Penilaian evaluasi adalah kegiatan untuk membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditentukan. Penilaian merupakan alat penting untuk membantu pengambilan keputusan sejak tingkat perumusan kebijakan maupun pada tingkat pelaksanaan program. Menurut Supriyanto pengertian evaluasi atau penilaian adalah merupakan bagian integral dari fungsi manajemen dan didasarkan pada sistem informasi manajemen. Evaluasi dilaksanakan karena adanya dorongan atau keinginan untuk mengukur pencapaian hasil kerja atau

kegiatan pelaksanaan program terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dimaksudkan untuk menetapkan relevan informasi guna pengambilan keputusan. (Stefanus Supriyanto, 2007: 209)

Menurut Vendung evaluasi melihat kebelakang agar dapat menyetir ke depan. Evaluasi merupakan mekanisme untuk memonitor, mensistematiskan dan meningkatkan aktivitas pemerintah dan hasil-hasilnya sehingga pejabat dalam pekerjaannya di masa akan datang dapat bertindak serta bertanggung jawab, kreatif dan seefisien mungkin. (dalam Wirawan, 2011: 6)

Sedangkan evaluasi menurut Ndraha adalah proses yang membandingkan antara standar kebijakan dengan fakta dan analisis hasilnya. (Ndraha, 2003: 201)

Berdasarkan pengertian mengenai evaluasi dari beberapa ahli yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi merupakan prosedur penilaian yang dilakukan untuk mengukur mulai dari perumusan sampai pelaksanaan kebijakan atau program maupun hasil kerja secara menyeluruh dengan membandingkan antara kriteria dengan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan, serta menilai adanya penyimpangan dari perencanaan awal sehingga dapat segera memberikan rekomendasi guna memperbaiki pelaksanaan suatu kebijakan atau program agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan sehingga dapat menjadi solusi bagi suatu permasalahan.

Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analisis kebijakan perlu menetapkan tipe kriteria yang sesuai untuk mengevaluasi hasil kebijakan tersebut.

Menurut William N. Dunn terdapat 6 kriteria evaluasi kebijakan seperti berikut: (William N. Dunn, 2003: 610)

- Efektivitas
- Efisiensi
- Kecukupan
- Perataan
- Responsivitas
- Ketepatan

Evaluasi Program

Evaluasi program menurut Arikunto dan Jabar adalah sebuah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan tersebut didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah baku. (Arikunto dan Jabar, 2008: 14)

Sedangkan evaluasi program menurut Ralp Tyler mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah sebuah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah terealisasi. (dalam Arikunto dan Jabar, 2008: 38) Sedangkan menurut Cronbach Stufflebeam evaluasi program merupakan sebuah upaya untuk menyediakan informasi yang kemudian disampaikan kepada

pengambil keputusan. (dalam Arikunto dan Jabar, 2008: 78)

Dengan melihat beberapa definisi evaluasi program dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan sebuah proses penetapan nilai, tujuan, efektifitas, atau kecocokan antara standar yang dibuat dengan kenyataan atau realisasi sehingga dapat diketahui apakah tujuan program sudah terealisasi.

Kriteria Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial

Daerah Kumuh (RSDK)

Dalam menghasilkan informasi terkait dengan kinerja kebijakan, diperlukan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi suatu program merupakan karakteristik program yang dianggap sebagai basis penting untuk melakukan riset evaluasi pada suatu kebijakan atau program.

Oleh karena itu, untuk dapat menentukan kriteria dalam penelitian ini berlandaskan pertimbangan menyangkut apa yang dianggap penting dan menjadi tujuan serta menjadi fokus penelitian evaluasi ini yaitu pada proses pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan evaluasi formal dengan kriteria evaluatif yang sering digunakan adalah menggunakan kriteria efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini menggunakan kriteria efektivitas dan efisiensi, hal itu didasari pertimbangan dari penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) terhadap pencapaian tujuan dan hasil program tersebut. Kriteria.

Efektivitas

Kriteria efektivitas ini merupakan kriteria yang berkaitan dengan target pencapaian tujuan dari usaha-usaha yang dilakukan dalam evaluasi kebijakan publik. Oleh karena itu, menurut peneliti kriteria ini relevan dengan *research problem* pada penelitian ini yaitu mengenai pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan melihat pada aspek pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh. Aspek utama untuk mengukur kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu aspek *output* dan *outcome*. Sedangkan aspek yang relevan dengan kebijakan ini adalah aspek *output* karena lebih menekankan pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program. Aspek *output* digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsidi dan lain – lain yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan atau program. (Erwan dan Dyah, 2012: 105)

Secara umum, apabila kebijakan atau program yang ingin dievaluasi merupakan kebijakan distributif, yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu anggota masyarakat atau kelompok sasaran yang kurang beruntung melalui instrumen material seperti

halnya pelayanan gratis, subsidi, hibah, dan lain – lain. Menurut Ripley indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas *policy output* adalah sebagai berikut: (dalam Erwan dan Dyah, 2012: 106-110).

Akses

Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa kebijakan atau program pelayanan yang diberikan oleh pemerintah memiliki kemudahan untuk dijangkau oleh kelompok sasaran. Indikator akses ini juga mengandung pengertian bahwa adanya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti halnya: gender, etnisitas, agama, afiliasi politik. Dengan demikian, akses dapat dipahami tidak terjadi diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok. (Erwan dan Dyah, 2012: 106-107)

Dalam penelitian ini akses diartikan sebagai kemudahan kelompok sasaran dalam mengakses atau mendapatkan manfaat program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).

Cakupan (coverage)

Indikator cakupan (*coverage*) digunakan untuk menilai kebijakan atau program tersebut dengan seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana, dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan. (Erwan dan Dyah, 2012: 107)

Dalam penelitian ini cakupan (*coverage*) diartikan sebagai kelompok sasaran dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).

Frekuensi

Indikator frekuensi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang ditawarkan oleh suatu kebijakan atau program. Indikator frekuensi menjadi sangat penting dan relevan ketika digunakan untuk mengetahui keberhasilan kebijakan atau program yang jenisnya tidak hanya diberikan sekali, namun berulang kali. (Erwan dan Dyah, 2012: 108)

Indikator frekuensi dalam penelitian kali ini tidak digunakan dikarenakan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) merupakan program yang dilaksanakan secara bergulir setiap tahunnya, sehingga kelompok sasaran hanya bisa mendapatkan satu kali dan kelompok lainnya untuk tahun berikutnya.

Bias

Indikator bias merupakan indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian apakah dalam pelaksanaan kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh implementer terjadi bias (penyimpangan) kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak *eligible* untuk menikmati bantuan, hibah, atau pelayanan yang seharusnya bukan untuk mereka. (Erwan dan Dyah, 2012: 108)

Dalam penelitian ini bias diartikan sebagai penyimpangan kelompok sasaran program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).

Ketepatan Layanan (*service delivery*)

Indikator ketepatan layanan (*service delivery*) digunakan untuk melakukan penilaian apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator ini sangat penting untuk menilai *output* suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Dalam artian bahwa jika terjadi keterlambatan dalam implementasi program tersebut akan membawa implikasi kegagalan mencapai tujuan program tersebut. (Erwan dan Dyah, 2012: 108-109)

Dalam penelitian ini indikator ketepatan layanan (*service delivery*) tidak digunakan, karena program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) merupakan program yang tidak memiliki sensitivitas terhadap waktu dalam pelaksanaannya. Sehingga kurang relevan apabila menggunakan indikator tersebut.

Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementor dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelaksana kebijakan atau program kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. (Erwan dan Dyah, 2012: 109)

Dalam penelitian ini akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).

Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Indikator kesesuaian program dengan kebutuhan digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran merupakan sesuatu yang dibutuhkan mereka atau tidak. (Erwan dan Dyah, 2012: 110)

Dalam penelitian ini indikator kesesuaian program dengan kebutuhan diartikan sebagai kesesuaian program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dengan kebutuhan kelompok sasaran.

1. Efisiensi

Kriteria selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria efisiensi. Kriteria efisiensi ini menilai suatu kebijakan atau program mengenai seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk dapat menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos atau biaya. (William N. Dunn, 2003: 430)

Sedangkan menurut Ghiselli dan Brown efisiensi yaitu "*The term efficiency has a very exact definition, It*

is expressed as the ratio of output to input." Menurut Ghiselli dan Brown efisiensi memiliki makna bahwa adanya perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Artinya efisiensi ini memiliki pemahaman bahwa hasil yang dicapai oleh suatu kebijakan atau program dengan usaha-usaha termasuk sumber daya yang diperkirakan untuk digunakan dalam pelaksanaannya sehingga mencapai hasil yang maksimal. (dalam Ibnu Syamsi, 2004: 4)

Dalam penelitian ini kriteria efisiensi sesuai dengan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). (RSDK) digunakan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya selaku pelaksana program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) yang berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki (sumber dana dan SDM) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Umumnya efisiensi berkaitan dengan: 1. *Input*, sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu program untuk mencapai tujuannya, dalam penelitian ini dipahami sebagai sumber dana dan sumber daya manusia; 2. *Output*, merupakan suatu hasil dari pelaksanaan suatu program atau kebijakan, berupa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, dalam penelitian ini terkait dengan bentuk kegiatan program dan Laporan Realisasi Anggaran

Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Surabaya, khususnya Dinas Sosial Kota Surabaya. Fokus penelitian ini sendiri adalah pada Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) yang menjadi wewenang dari Dinas Sosial Kota Surabaya. Pada penentuan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan siapa saja pihak yang menjadi pelaku dalam pelaksanaan program RSDK di Kota Surabaya yaitu Dinas Sosial Kota Surabaya, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, DPRD Kota Surabaya sebagai pihak dari legislatif serta anggota UPKM selaku pelaksana program di lingkup kelurahan serta masyarakat yang menerima program RSDK itu sendiri.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dimana informan yang dipilih merupakan pihak yang memiliki posisi terbaik untuk memberikan informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pada penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)

Dalam penelitian ini, untuk dapat menilai efektivitas pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) menggunakan kinerja implementasi yang menurut Ripley aspek yang digunakan untuk menilai kualitas *policy output*, yaitu 1). Akses; 2). Cakupan (*Coverage*); 3). Frekuensi; 4). Bias; 5). Ketepatan layanan (*service delivery*); 6). Akuntabilitas; 7). Kesesuaian program dengan kebutuhan. (dalam Erwan dan Dyah, 2012: 105-110)

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti memilih beberapa indikator yang relevan dengan penelitian ini demi mencapai ketepatan pengukuran kinerja *policy output*. Indikator – indikator *policy output* yang dinilai relevan adalah 1). Akses; 2). Cakupan; 3). Bias; 4). Akuntabilitas; 5). Kesesuaian program dengan kebutuhan.

Akses

Indikator Akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Pada program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya diketahui bahwa pelaksanaan program tersebut memiliki mekanisme yang jelas mulai dari sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial terkait adanya pelaksanaan program. Akses bagi kelompok sasaran dalam mendapatkan program cukup mudah karena bagi warga yang ingin mendapatkan program bisa mengajukan diri dengan mendaftar melalui pengurus RT, RW, Kelurahan maupun langsung kepada UPKM di lingkungannya. Dalam temuan lain bahkan ada beberapa UPKM yang mendata atau mendatangi warga di kelurahannya untuk mengikuti program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Mudah akses kelompok sasaran dalam mendapatkan program ini karena mekanisme yang telah jelas dan adanya komitmen dari masing-masing pihak pelaksana program.

Cakupan (*coverage*) dan Bias

Dalam menentukan penerima sasaran program RSDK setiap calon penerima dilakukan penilaian dari unsur RT RW Kelurahan dan UPKM dengan menampilkan slide kemudian penentuan penerima sasaran dilakukan dengan cara musyawarah, siapa yang lebih pantas mendapatkan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh pada tahun itu. Dengan adanya mekanisme seperti ini lebih menjamin ketepatan kelompok sasaran yang mendapatkan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh karena dilakukan dengan musyawarah dengan unsur kelurahan maupun lingkungan RT RW yang lebih mengetahui kondisi sebenarnya warga tersebut.

Akuntabilitas

Pada pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya menurut

informan di lapangan ditemukan bahwa pertanggungjawaban Dinas Sosial sebagai pelaksana program melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan di lapangan kepada Badan Perencanaan Kota, hal ini terkait pencapaian target atau relaisasi setiap tahunnya apakah terdapat kendala atau tidak. Sedangkan dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di lingkup kelurahan dilaksanakan oleh UPKM selaku pengelola program maupun dana bantuan. Bentuk akuntabilitas UPKM melakukan pelaporan langsung kepada Dinas Sosial Kota Surabaya.

Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Temuan di lapangan juga memperlihatkan bahwa bentuk bantuan yang diberikan dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh bukan hanya perbaikan rumah warga saja, melainkan terdapat pelatihan yang wajib diikuti bagi penerima program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh. Bentuk pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial seperti Tata Boga, ketrampilan merajut, dan membuat aksesoris. Dari informasi yang didapatkan dalam penelitian menyatakan bahwa pelatihan yang diharuskan diikuti warga berjalan selama 3 hari dan bentuk pelatihan tersebut bagi warga susah untuk dikembangkan karena tanpa adanya pelatihan warga juga sudah bisa melakukannya, dan tidak adanya modal usaha menjadi salah satu alasan tidak maksimalnya hasil dari pelatihan tersebut, ditambah lagi dengan tidak adanya pengawasan lebih lanjut dalam kegiatan pengembangan ekonomi warga tersebut. Namun mulai dari tahun 2015 kegiatan pelatihan tersebut sudah tidak dilakukan dikarenakan adanya klasifikasi bahwa pelatihan tersebut dikembalikan ke SKPD yang berwenang yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya.

Evaluasi Efisiensi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)

Input

Sumber Dana Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)

Berdasarkan informasi dari penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya tidak terdapat kerjasama atau dukungan dari pihak swasta, hal ini juga dipertegas dengan tidak diperbolehkannya menggabungkan uang bantuan dari APBD dengan bantuan dari pihak luar dikarenakan adanya sistem laporan keuangan tersendiri. Kerjasama atau bantuan dari pihak luar dapat berupa CSR atau semacamnya dengan fasilitasi data dari pihak pelaksana program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh.

Output

Usaha Yang Dilakukan Dalam Pencapaian Tujuan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara ditemukan bahwa pelaksanaan

program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya dalam penyiapan UPKM telah dilaksanakan secara baik karena rata-rata pihak kelurahan telah memiliki UPKM. Sedangkan dalam kegiatan perbaikan lingkungan tidak ditemukan adanya informasi mengenai perbaikan lingkungan dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Tidak adanya kegiatan perbaikan lingkungan tersebut telah dikonfirmasi kepada pihak pelaksana baik dari Dinas Sosial, maupun pendamping, sedangkan dari pihak UPKM dan masyarakat juga membenarkan tidak adanya kegiatan perbaikan lingkungan dalam pelaksanaan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian, analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan tentang Evaluasi program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya, maka dapat disimpulkan:

1. Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya masih dipahami dengan cara pandang yang berbeda-beda baik dari pihak pelaksana ataupun pemangku kepentingan yang ada di Kota Surabaya.
2. Evaluasi Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya yang ditinjau dari kelima aspek/indikator yang digunakan dalam penilaian (*assessment*) mengenai efektivitas kebijakan ada 4 indikator yang bias dikatakan cukup efektif, yaitu
 - a. Akses, karena pada pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya diketahui bahwa akses untuk mendapatkan program ini cukup mudah.
 - b. Cakupan (*coverage*), karena pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dilaksanakan dengan cara bergulir setiap tahunnya, maka hampir seluruh wilayah yang ada di Surabaya yang menjadi kawasan dengan kondisi kumuh pernah terjangkau oleh program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).
 - c. Bias, karena dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) pemilihan penerima program dilakukan dengan musyawarah Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung (KRKK) yang dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh pemangku kepentingan di lingkungan kelurahan sehingga nantinya masyarakat yang dipilih untuk menjadi penerima bantuan program RSDK ini merupakan masyarakat yang menjadi prioritas untuk dibantu atau penentuan dilakukan dengan melihat siapa yang paling mendesak.
 - d. Akuntabilitas, karena pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di

lingkungan kelurahan dilaksanakan melalui peran UPKM, sehingga pengelolaan baik kegiatan

program ataupun pendanaan program dilakukan melalui peran UPKM di tiap kelurahan.

Selanjutnya, indikator yang bisa dikatakan tidak efektif dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), yaitu:

- a. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan, karena dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) bentuk kegiatan dalam program ini adalah adanya pelatihan bagi penerima program RSDK yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat miskin.
3. Evaluasi Efisiensi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya. Dari hasil analisis dan interpretasi data, menunjukkan bahwa efisiensi dari pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya, yaitu:
 - a. Sumber dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) hanya bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya.
 - b. *Output* dari pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya, komponen utama program RSDK yang diimplementasikan di kawasan perumahan kampung terdiri dari: a) penyiapan UPKM; b) perbaikan lingkungan dan bangunan rumah tidak layak huni; dan c) penumbuhan dan/atau pengembangan ketrampilan sosial-ekonomi keluarga, tidak seluruhnya direalisasikan dalam pelaksanaan program RSDK. Dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) tidak ditemui adanya kegiatan untuk perbaikan lingkungan dan dalam penumbuhan atau pengembangan ketrampilan sosial-ekonomi keluarga dilakukan dengan bentuk kegiatan pelatihan berakhir pada tahun 2014.

Melihat dari *input* dan *output* diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya tidak berjalan dengan efisien sehingga tidak dapat mendukung untuk ketercapaian tujuan dari program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).

Saran

Saran yang bisa diberikan peneliti dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, yaitu:

1. Dalam hal efektivitas proses pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di Kota

Surabaya, yaitu dalam pemilihan UPKM sebelum memilih pengurus perlu diperhatikan kegiatan keseharian dari calon UPKM apakah memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), karena apabila pengurus UPKM merupakan orang yang masih aktif bekerja akan mengganggu kinerjanya dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di kelurahannya sehingga tidak dapat maksimal.

2. Dalam kegiatan pelatihan apabila tidak dapat dilakukan oleh Dinas Sosial lagi, hendaknya Dinas Sosial melakukan kerjasama secara jelas dengan SKPD terkait dalam memberikan pelatihan bagi warga, karena pelatihan ini sebagai bentuk kegiatan dalam pengembangan ekonomi yang tercantum dalam tujuan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh namun bentuk pelatihan yang diberikan harus lebih bervariasi dan mudah diaplikasikan bagi kalangan keluarga miskin atau bisa dibentuk menjadi sebuah kelompok usaha bersama (KUBE) dan dilakukan pengawasan meskipun program RSDK telah selesai sehingga keberlanjutan program dapat dirasakan.
3. Begitu juga halnya dengan perbaikan lingkungan juga apabila bukan wewenang dari Dinas Sosial bisa bekerjasama dengan SKPD lain yang berwenang untuk perbaikan fisik lingkungan di daerah kumuh. sedangkan untuk perbaikan rumah tidak layak huni dana bantuan yang diberikan bisa ditingkatkan dengan catatan bentuk kegiatan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) aspek yang dibenahi bisa lebih menyelesaikan permasalahan pada kawasan permukiman kumuh secara luas, dan hendaknya terdapat fokus tersendiri bagi kawasan yang memiliki kondisi dengan tingkat kumuh yang lebih tinggi.
4. Terkait efisiensi proses pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya, diharapkan dapat memaksimalkan kerjasama yang dimungkinkan dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) mengingat besarnya bantuan bagi masyarakat yang masih minim jumlahnya, sehingga perbaikan sosial daerah kumuh dapat benar-benar dirasakan secara luas.
5. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) harus benar-benar direalisasikan dengan kegiatan yang bisa memberikan kontribusi secara langsung terhadap tujuan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), sehingga efisiensi dalam pencapaian tujuan program bisa terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- Arikunto dan Jabar. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Erwan dan Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Romdiati at al. 2004. *Migrasi Dan Permukiman Kumuh Di Surabaya*. Jakarta: PPK – LIPI.
- Syamsi, Ibnu. 2004. *Efisiensi, sistem, dan prosedur kerja*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta : Rajawali Press.
- [http://www.slideshare.net/InoyTrisnaini/permukiman-](http://www.slideshare.net/InoyTrisnaini/permukiman-kumuh-slum-area)

[kumuh-slum-area](http://www.slideshare.net/InoyTrisnaini/permukiman-kumuh-slum-area) diakses tanggal 3 januari 2016 pukul 16.00 WIB

